

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



**BALAI PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN (BPPMHKP)
TARAKAN
2026**

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Didalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tarakan Tahun 2026.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tarakan, 16 April 2026
Plt. BPPMHKP Tarakan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Whidi Anggraeni, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. PENDAHULUAN.....	6
II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
Target dan Capaian	12
Analisis Dan Evaluasi	15
Realisasi Anggaran.....	34
Realisasi Anggaran per Sasaran Program.....	35
IV. PENUTUP	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan pada Tahun 2026 sebesar 112.24%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan (IKK) BPPMHKP Tarakan yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Terdapat 6 IKK yang capaiannya memenuhi target pada tahun 2026 sebagai berikut:
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Tarakan (%) (target semula 72% menjadi 74%);
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%). (target semula 72% menjadi 86.01%);
 3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%) (target semula 71% menjadi 78.48%);
 4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (persen) (target semula 86% menjadi 100%);
 5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%) (target semula 77% menjadi 100%)
 6. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Indeks) (target semula indeks 3.5 menjadi indeks 3,81)
- B. Terdapat 6 IKK yang capaiannya belum memenuhi target pada tahun 2026 sebagai berikut:
1. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)
 2. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (indeks)
 3. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)
 4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)

5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai) 92,1
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)

Kinerja keuangan BPPMHKP Tarakan Tahun 2026 sebesar Rp. 5.162.439.000,-. Tetapi mengalami perubahan pada Bulan Maret dikarenakan adanya efisiensi anggaran menjadi 4.629.929.000,-. Pagu anggaran BPPMHKP Tarakan tersebut dilaksanakan melalui program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan agar Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan dan Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

I. PENDAHULUAN

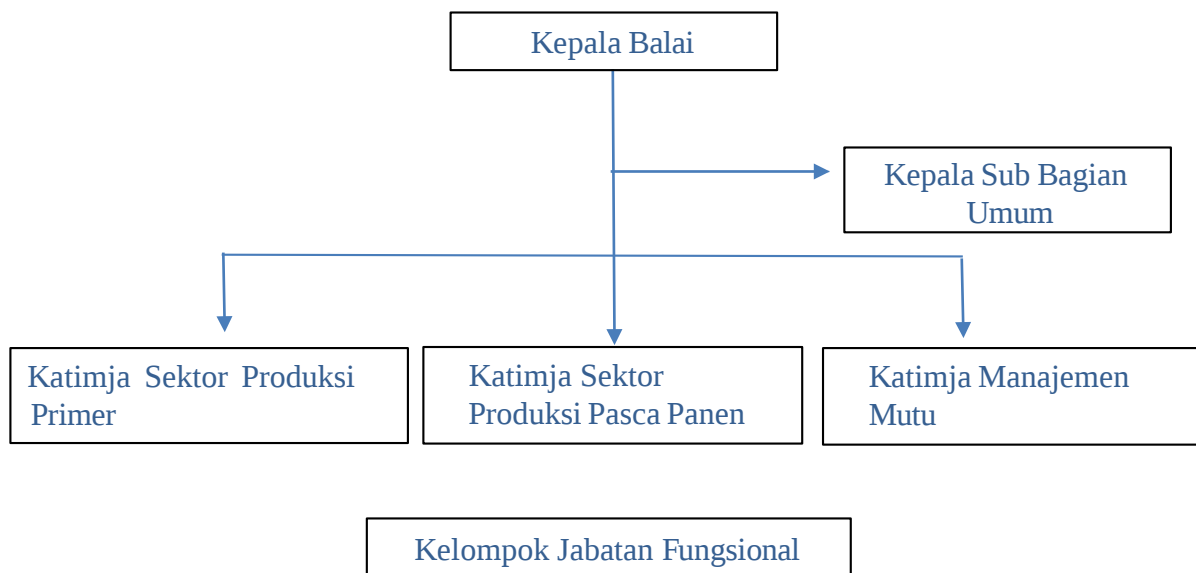
Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu (Quality Assurance) keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tahun 2026 Balai PPMHKP Tarakan mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 15 (lima belas) orang pegawai PNS, 8 (delapan) orang pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1 (satu) orang pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) 5 (lima) orang Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Pegawai Magang 2 (dua) orang.

Bagan struktur organisasi Balai PPMHKP Tarakan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



BPPMHKP Tarakan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu (Quality Assurance) keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir.

II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

PETA STRATEGI BPPMHKP TARAKAN 2026

Terselenggaranya Pengendalian
Dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian
Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan
Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang
Konsisten Sesuai Standar

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP
Tarakan

Target kinerja Balai PPMHKP Tarakan tahun 2026 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini. Berikut target dan realisasi pada triwulan I tahun 2026.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW I TAHUN 2026		
				TARGET	REALISASI	%
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi perimer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)	72	74	102.78
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)	72	86.01	119.46
		3	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan UPT Balai PPMHKP Tarakan (nilai)	71	-	-
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	71	78.48	110.54

SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Tarakan	5	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Tarakan (Indeks)	82.5	-	-
		6	Nilai pembangunan Integritas lingkup UPT BPPMHKP Tarakan (Nilai)	77	-	-
		7	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Tarakan	86.2	-	-
		8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BPPMHKP Tarakan (%)	86	100	116.28
		9	Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkungan Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	92.1	-	-
		10	Nilai kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	71.75	-	-
		11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang diumumkan Pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	77	100	129.87
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Tarakan (Indeks)	3.5	3.81	108.86

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2026 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang diperjanjikan di tahun 2026 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2026.

Capaian kinerja Balai PPMHKP Tarakan pada 2026 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 112.24 %. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan pada tahun 2026 ini dalam pelaksanaannya sangat maksimal. Hal ini menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing- masing sasaran strategis.

Capaian kinerja Balai PPMHKP Tarakan pada Tahun 2026 seperti pada gambar Dashboard berikut ini.



Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2026 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Sesuai dengan renstra Balai PPMHKP Tarakan Tahun 2025-2029.

Target dan Capaian

Capaian atas 12 indikator kinerja kegiatan Balai PPMHKP Tarakan Triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan capaian sasaran kegiatan secara ringkas disajikan pada Tabel berikut ini

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2026		
				TARGET	REALISASI	%
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi perimer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)	72	74	102.78
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)	72	86.01	119.46
		3	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan UPT Balai PPMHKP Tarakan (nilai)	71	-	-

SK2.1	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	71	78.48	110.54
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Tarakan	5	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Tarakan (Indeks)	82.5	-	-
		6	Nilai pembangunan Integritas lingkup UPT BPPMHKP Tarakan (Nilai)	77	-	-
		7	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Tarakan	86.2	-	-
		8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT	86	100	116.28
		9	Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkungan Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)	92.1	-	-
		10	Nilai kinerja Perencanaan anggarencana Umum Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Tarakan	71.75	-	-
		11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang diumumkan Pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)	77	100	129.87

		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Tarakan (Indeks)	3.5	3.81	108.86
--	--	-----	---	-----	------	--------

Capaian Kinerja Balai PPMHKP Tarakan Triwulan I Tahun 2026

Analisis Dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis I: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Tarakan tahun 2026. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Tarakan.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Tarakan.
3. Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup BPPMHKP Tarakan.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)

Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	100	72	74	102.78	70	100

Dalam mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka dilakukan sertifikasi terhadap produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer budidaya meliputi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Selama tahun 2026, terdapat 2 jenis sertifikasi sektor produksi primer yaitu Sertifikasi CPIB Kapal dan CBIB bagi pembudidaya ikan.

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan terhitung dari jumlah sertifikat yang diterbitkan (CPIB Kapal, CBIB) dibagi dengan jumlah jenis sertifikasi. Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan periode Tahun 2026 Triwulan I sebesar 74% dari target 72%.

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : sertifikasi PMMT/HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, pelaksanaan inspeksi ketertelusuran (traceability), inspeksi / verifikasi tahunan CPIB di supplier dan kegiatan surveilen konsistensi penerapan HACCP di UPI.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diterapkan melalui pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak

pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), dan standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, SKP dan penerapan CPIB di supplier diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Sedangkan untuk Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran dan Surat Keterangan Hasil Surveilans diterbitkan berdasarkan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan proses produksi.

Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024- 2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2026	% Capaian terhadap Renstra
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	-	100	72	86.01	119.46	72	100

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

perhitungannya berdasarkan persentase jumlah UPI yang menerapkan HACCP, SKP, Ketertelusuran (traceability) dan UPI yang konsisten menerapkan HACCP dan telah dinilai dalam kegiatan surveilen serta pelaksanaan kegiatan inspeksi / verifikasi tahunan CPIB di supplier dibagi dengan jumlah parameter yang dinilai. Pada Tahun 2026, capaian kegiatan persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 119.46 % atau 86.01 % dari target sebesar 72 %.

IK3. Nilai pengawasaan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Republik Indonesia, merupakan nilai pengawasaan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah RI yang meliputi pengawasaan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Lokasi pengawasaan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Pada tahun 2026 telah dilaksanakan Kegiatan Inpres no 01 tahun 2017 untuk periode I di 1 lokasi yakni di kota Tarakan. Lokasi pengawasaan mutu dilakukan pada pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tarakan (Pasar Gusher, Pasar Beringin dan Pasar Tenguyun) dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi

Pada tahun 2026 kegiatan Inpres no.01 tahun 2017 telah dilaksanakan pada 1 lokasi yakni di Kota Tarakan. Untuk Triwulan I tahun 2026 belum dilakukan pengukuran karena bersifat semesteran.

Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024 - 2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Lokasi pengawasaan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%) (UPI)	-	-	71	-	-	1	100

Sasaran Strategis II: Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Tarakan tahun 2026. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yaitu nilai Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan

IK4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan (%)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 :2017 dan ISO/IEC 17020 : 2012 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar system manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024-2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2025-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan	-	-	71	78.48	110.54	71	100

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Realisasi indikator kinerja nilai pemenuhan Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Tarakan pada Tahun 2026 sebesar 78.48 dari target 71, sehingga pencapaiannya sebesar 110.54%.

Sasaran Strategis III: Tatakelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu indikator kinerja Balai PPMHKP Tarakan. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Peraturan BKN No.8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, peraturan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat)/ Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D3/SM	10
1	Pendidikan D2/D1/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jafung	Kompetensi Staf
	Diklat Srtruktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP	15	15	22.5
0	dalam tahun terakhir	0	0	0
	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir			
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

2. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
- Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

3. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

4. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pada tahun 2025, pengukuran terhadap indeks profesionalitas ASN terealisasi sebesar 83,62 % dari target yang telah ditetapkan 82% sehingga mencapai 102%. Untuk Triwulan I tahun 2026 belum dilakukan pengukuran karena bersifat tahunan.

Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024-2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Indeks profesionalitas ASN	86	83.62	82.5	-	-	87	-

IK.6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup UPT BPPMHKP Tarakan (%)

Persentase Nilai pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diukur berdasarkan dua komponen: Komponen Pengungkit (bobot 60%) dan Komponen Hasil (bobot 40%).

Persentase Pemenuhan:

- Persentase pemenuhan dokumen ZI ditentukan berdasarkan nilai yang dicapai pada masing-masing komponen.
- Unit kerja yang memenuhi syarat sebagai unit kerja WBK akan direkomendasikan oleh Menpan RB kepada pimpinan untuk ditetapkan dengan predikat WBK.
- Untuk WBBM, nilai yang perlu diraih lebih tinggi lagi, dengan minimal nilai total (pengungkit dan hasil) 85.

Pada tahun 2025, persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas pada Balai KIPM Tarakan mencapai nilai realisasi 70.03 dari target 70. Sehingga pencapaiannya 101%.

Pada tahun 2026, nilai pembangunan integritas belum dilakukan dikarenakan bersifat tahunan.

Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024-2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT	-	70.03	77	-	-	70	-

IK 7. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tarakan

Penilaian Mandiri SAKIP dengan LKE pada aplikasi kinerjajaku adalah nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja diukur dengan hasil penilaian Itjen yang sesuai dengan lembar kerja evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Instansi Pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Penginputan Realisasi Capaian Kinerjajaku pada aplikasi Kinerjajaku;
2. Upload dokumen pendukung realisasi capaian IKU.

Pada tahun 2024, pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja terealisasi sebesar 82.50% dari target yang telah ditetapkan 82% sehingga mencapai 100.09 %.

Pada tahun 2025, pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja terealisasi sebesar 88.50% dari target yang telah ditetapkan 86% sehingga mencapai 103 %.

Pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilakukan pengukuran dikarenakan bersifat tahunan.

Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2023 - 2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2029	% Capaian terhadap Renstra
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tarakan	82.50	88.50	86.2	-	-	86	-

IK8. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Tarakan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai PPMHKP Tarakan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai PPMHKP Tarakan yang menjadi objek pengawasan.

Target indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85%.

Pada tahun 2025 nilai rekomendasi pengawasan mencapai 100 % dari target 85% sehingga pencapaiannya sebesar 117%.

Pada tahun 2026 nilai rekomendasi pengawasan mencapai 100% dari target 86% sehingga pencapaiannya sebesar 116.28%.

Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024-2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	80	85	86	100	116.28	85	118,75

IK9 . Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan

anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Penilaian IKPA meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA;
- b. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); serta
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output.

Nilai IKPA dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan parameter dan bobot:

1. Indikator Revisi DIPA (10%);
2. Indikator Deviasi Hal III DIPA (15%);
3. Indikator Penyerapan anggaran (20%);
4. Indikator belanja kontraktual (10%);
5. Indikator Penyelesaian tagihan (10%);
6. Indikator pengelolaan UP dan TUP (10%);
7. Indikator Dispensasi SPM (5%) dan
8. Indikator Capaian Output (25%).

Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi MYINTRESS (myintress.kemenkeu.go.id)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang

- telah disusun sehingga memperkecil deviasi antara target dan realisasi;
2. Menyiapkan dokumen belanja kontraktual dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN;
 3. menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai;
 4. Menggunakan UP secara Tunai dan KKP secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP paling sedikit 100% dalam satu bulan;
 5. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open periode reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).

Capaian indikator pada Tahun 2024 sebesar 92.28 dari target 93.76 sehingga pencapaian 98%.

Capaian indikator pada tahun 2025 sebesar 96,23 dari target 92 sehingga pencapaian 104%.

Pengukuran indikator ini bersifat tahunan sehingga belum ada nilai yang dicapai pada Triwulan I tahun 2026.

Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024-2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2029	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92.28	96.23	92.1	-	-	92	-

IK 10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output / outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

Formulasi untuk menghitung capaian indikator nilai kinerja anggaran adalah:

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai kerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran (Bobot penyerapan anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran dan akumulasi realisasi anggaran bulanan rencana penarikan dana bulan dengan jumlah bulan (Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot pencapaian keluaran (WPK) = 43,5 %)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot efisiensi (WE) = 28,6 %)

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup Balai PPMHKP Tarakan, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan. Balai PPMHKP Tarakan terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran Balai PPMHKP Tarakan beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
 - b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar
7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui:
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;

- b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan isik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.

Capaian indikator pada Tahun 2024 sebesar 86.67 dari target 71 sehingga pencapaian 122%.

Capaian indikator pada tahun 2025 sebesar 100 dari target 71,50 sehingga pencapaian 120%.

Capaian indikator pada tahun 2026 belum dinilai karena pengukurannya bersifat semester.

Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2025	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Nilai kinerja anggaran	86	100	71.75	-	-	71.5	-

IK11. Persentase rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT BPPMHKP Tarakan(%)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku dan sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan

barang/ jasa lingkup Balai PPMHKP Tarakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Terkait pencapaian tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kedepan, diantaranya:

- 1) memperkuat penilaian risiko PBJ;
- 2) memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) atas pelaksanaan PBJ;
- 3) mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ;
- 4) mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ.

Pada Tahun 2025, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Balai KIPM Tarakan mencapai realisasi 100 dari target 76. Sehingga pencapaiannya sebesar 120%.

Pada tahun 2026, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Balai KIPM Tarakan mencapai realisasi 100 dari target 77. Sehingga pencapaiannya sebesar 120%.

Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2024-2025		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2024-2025	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Persentase rencana umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Tarakan (%)	84.34	100	77	100	129.87	76	-

IK12. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai PPMHKP Tarakan (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai PPMHKP Tarakan menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Daftar pertanyaan survei terdiri atas 9 unsur :

- Persyaratan;
- Sistem;
- Prosedur;
- Waktu Pelayanan;
- Biaya/Tarif;
- Produk Spesifikasi;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Penanganan Pengaduan;
- Sarana.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2025, indeks kepuasan masyarakat layanan publik pada Balai KIPM Tarakan terealisasi sebesar 3.99 dengan target yang ditetapkan sebesar 3.36.

Pada Triwulan I tahun 2026, indeks kepuasan masyarakat layanan publik pada Balai KIPM Tarakan terealisasi sebesar 3.81 dengan target yang ditetapkan sebesar 3.5.

Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja	REALISASI 2023-2024		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026			RENSTRA Set. BKIPM 2020- 2024	
	2024	2025	Target	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2025	% Capaian terhadap Renstra
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	-	3.99	3.5	3.81	108.86	88	100

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran BPPMHKP Tarakan pada Tahun anggaran (T.A) 2026 adalah sebesar Rp.5.162.439.000, akan tetapi mengalami revisi di bulan Maret 2026 sehingga pagu anggaran BPPMHKP Tarakan menjadi Rp. 4.629.929.000,-.

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Tahun 2026 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 3.11 sampai Tabel 3.12

Tabel 3. 11. Penyerapan Anggaran per jenis Kegiatan periode Triwulan I tahun

No.	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Dukungan Manajemen Internal BPPMHKP Tarakan	4.427.352.000	1.674.110.817	37.81
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	127.577.000	15.475.000	12.13
3.	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	75.000.000	27.034.300	36.04
Total		4.629.929.000	1.716.620.117	37.08

Tabel 3.12. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja periode Triwulan I tahun 2026

No.	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3.337.022.000	1.206.999.210	36.17
2.	Belanja Barang	1.292.907.000	506.620.907	39.42
3.	Belanja Modal	0	0	0%
Total		4.629.929.000	1.716.620.117	37.08

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN PROGRAM

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2026 berdasarkan sasaran program disajikan pada Tabel 3.35.

Realisasi penyerapan anggaran ini telah digunakan dalam rangka pencapaian sasaran program dan indikator kinerja. Jika dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Penyerapan Anggaran per Sasaran Program tahun 2026

No.	Jenis Anggaran	Pagu	Realisasi	%
1.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	127.577.000	15.475.000	12.13
2.	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar	75.000.000	27.034.300	36.05
3.	Dukungan Manajemen Internal BPPMHKP Tarakan	4.427.352.000	1.674.110.817	37.81
Total		4.629.929.000	1.716.620.117	37.08

Realisasi penyerapan anggaran per sasaran program, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran program Dukungan Manajemen Internal BPPMHKP Tarakan sebesar 37.81 % dan yang terkecil ada pada sasaran program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 12.13%.

Walaupun demikian, dengan capaian realisasi anggaran per sasaran strategis tersebut BPPMHKP tetap dapat mencapai hasil sangat baik dengan seluruh target Tahun 2026 pada Periode Triwulan I tahun 2026 tercapai yaitu 6 indikator. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis BPMHKP Tahun 2026 sebesar 112,24%, dengan kategori Istimewa (>110) dimana Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) ini merupakan gambaran pencapaian nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian kinerja pada periode Triwulan I tahun 2026, dari 6 Indikator Kinerja Utama Balai PPMHKP Tarakan melebihi target 100% dan 6 Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai dikarenakan bersifat tahunan atau semester.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai PPMHKP Tarakan tahun 2026 dalam mendukung penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penjaminan mutu hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai PPMHKP Tarakan serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan mutu hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 12 indikator kinerja utama, Balai PPMHKP Tarakan tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan reviu terhadap target dan capaian IKU setiap bulan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan terutama yang berhubungan langsung dengan target IKU UPT.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan

hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya Laporan Capaian Kinerja Balai PPMHKP Tarakan periode Triwulan I tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan di masa mendatang.